

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

ANALISA KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ISTBAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERNIKAHAN

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Disusun Oleh :

MUHAMMAD FADILISSYAKUR SUDARMANTO

11521104169

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *ANALISA KOMILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ITSBAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERNIKAHAN*, yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Fadilissyakur Sudarmanto**
 NIM : 11521104169
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
 Waktu : 02.00Wib
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Agustus 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Mutasir, S.Hi, M.Sy

Penguji I
Ade Fariz Fakhrrullah, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Suhayyib, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 1968031 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *ANALISA KOMILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ITSBAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERNIKAHAN*, yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Fadilissyakur Sudarmanto**
 NIM : 11521104169
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Agustus 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Mutasir, S.Hi, M.Sy

Penguji I
Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Suhayyib, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Asfendi, S.Ag., M.Si
 NIP. 19610918 198803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISA KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ITSBAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERNIKAHAN** yang ditulis oleh:

Nama : M FADILISSYAKUR S

Nim : 11521104169

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui serta dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Ramadhan 1440

30 - 0 April 2019 M

Pembimbing Skripsi

UIN SUSKA RIAU

Dr. Drs. HAJAR, M.Ag

NIP. 11580712 198603 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7146/2019

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD FADILISSYAKUR SUDARMANTO
Nm	: 11521104169
Tempat/Tgl.Lahir	: DUMAI / 19 Maret 1995
Semester	: IX (Sembilan)
Prodi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Konsentrasi	: Tidak Ada
Judul Skripsi	: Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Sirri Wali Yang Tidak Memenuhi Syarat Pernikahan

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan IPK 3.53 berprediket Sangat Memuaskan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 29 Agustus 2019

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP.195807121986031005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M Fadilissyakur S, (2019): Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri Wali Yang Tidak Memenuhi Syarat Pernikahan.

Masyarakat kota Dumai yang melakukan pernikahan Sirri atau pernikahannya tidak tercatat oleh negara dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tentunya wali pernikahan tersebut memenuhi syarat pernikahan, maka dapat disahkan perkawinannya melalui itsbat nikah. Namun dalam beberapa kasus pernikahan sirri yang mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama yang mana wali dalam pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan tetap di itsbatkan dan dikeluarkan utusan itsbatnya oleh Pengadilan Agama Dumai seperti hal nya perkara itsbat nomor 0015/Pdt.P/2017/PA Dum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana majelis hakim Pengadilan Agama Dumai menetapkan itsbat nikah pernikahan yang tidak tercatat di KUA yang walinya tidak memenuhi syarat pernikahan ? (2) Bagaimana analisa terhadap putusan perkara isbat nomor 0015/Pdt.P/2017/PA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dumai?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Dumai dalam menetapkan itsbat nikah pernikahan tidak tercatat di KUA walinya tidak memenuhi syarat pernikahan. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar dan pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kota Dumai dalam memutuskan perkara itsbat nikah tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deduktif, induktif, deskriptif. Sebagai data primer dan data sekundernya diambil langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Dengan menggunakan teknik *total sampling*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa bahwa dalam pengajuan istbat nikah tersebut Majelis Hakim tidak secara mendetail dalam menanyakan perihal wali yang menikahkan para pemohon yang mengajukan istbat. Majelis hakim hanya melihat bahwa sudah terpenuhi syarat suami, isteri, saksi, wali, ijab Kabul dan mahar. Kemudian majelis Hakim melakukan sumpah supleitoir menanyakan apakah benar adanya pernikahan tersbut. Maka berdasarkan hal tersbut pernikahan sirri yang dilakukan oleh yang bersangkutan sudah dinyatakan sah dan di isbatkan oleh Pengadilan Agama Dumai.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISA KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ITS BAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERNIKAHAN”**

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril ataupun materil. Terutama keluarga besar penulis yang tak pernah putus dalam mendoakan dan menasehati. Terkhusus kepada Bapak, Ibunda, dan seluruh keluarga. Mereka adalah motivasi terbesar yang telah membawa penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Papa tercinta Sudarmanto , yang setiap tetes keringatnya tidak pernah lelah berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya dan selalu istiqomah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingatkan anaknya dalam hal agama, terutama penulis anaknya tercinta.

2. Mama tercinta Nurlela, sosok ibu yang sangat luar biasa dengan kelembutan dan kasih sayangnya yang selalu berusaha mendoakan untuk keluarga, selalu mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama dan selalu menjadi penyemangat bagi anak-anaknya, terkhususnya untuk penulis
3. Adik-adik ku M. Mustagfiri Izzi S dan Sonia Aufa selalu memberikan dukungan dan semangat kepada abangnya, semoga menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Sukses selalu.
4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.A, selaku Rektor UIN Suska Riau dan wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Hajar Hasan M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Dr. Heri Sunandar M.CL selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag Selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Hajar Hasan M. Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
9. Bapak Dr. Suhayib M.A selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
10. Bapak dosen, Ibu dosen, Saudara/i, kerabat dan teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2015 yang telah menemani selama lebih kurang empat tahun, serta pihak yang memberikan jasa dan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau terutama local AH B angkatan 2015 yang telah menjalin kebersamaan dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan susah duka bersama kalian tidak akan pernah terlupakan.
12. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Suska Riau keluarga kecil yang luar biasa terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita selama ini.
13. Teman-teman LTMNU Riau dan Bersih Bersih Mesjid Berkah yang selalu membimbing dan mengingatkan untuk bersama memakmurkan rumah Allah, semoga hidup kalian selalu dalam rahmat dan berkah Allah SWT.
14. Teman-teman Garuda KPPRI Riau yang selalu berjuang bersama mengajarkan bagaimana arti perjuangan terimakasih telah membimbing penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Sahabat Senior Mutasir selaku dosen UIN Suska Riau juga sebagai senior yang telah banyak memberikan ilmu nya kepada penulis.
16. Sahabat Senior Andredo yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis baik di dunia kampus maupun luar kampus.
17. Orang-orang yang telah hadir dalam kehidupan penulis yang banyak memberikan semangat dan bantuan moril maupun materil.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat,, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis aturkan do'a semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.

Pekanbaru, 30 April 2019
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD FADILISSYAKUR SUDARMANTO
NIM. 11521104169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	20
A. Geografis dan Demografis	20
B. Struktur Organisasi	24
C. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Dumai	26
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Dumai	28
BAB III HUKUM PERNIKAHAN SIRRI	35
A. Pengertian Nikah Sirri	35
B. Sebab Akibat Pernikahan Sirri	39
C. Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	44
a. Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam	44
b. Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif	51
D. Hukum dan Syarat Itsbat Nikah	55
a. Pengertian Itsbat Nikah	55
b. Syarat dan Prosedur Itsbat Nikah	65

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Akibat Hukum Itsbat Nikah.....	73
-----------------------------------	----

BAB IV	ANALISA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN PERKARA ITS BAT Nomor 0015Pdt.P/2017/PA.Dum WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERNIKAHAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Dumai).....	75
	A. Duduknya Perkara	75
	B. Pertimbangan Hukum.....	76
	C. Penetapan Majelis Hakim Terhadap Putusan Perkara Itbat Nikah Sirri Nomor 0015.Pdt.P/2017/PA.Dum	81
	D. Pertimbangan Hukum.....	83
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran.....	88

DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Secara normatif banyak ayat dan hadis menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, al- qur'an juga menyebut dalam surat an-Nisa (4): 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

:

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengabilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. Bahwa perkawinan sebagai mitsaqan galidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh.”

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan *zawaj*.¹ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 79.

² Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكًا وَطَءً يَلْفِظُ اِنْكَاحًا أَوْ تَزْوِيجًا أَوْ مَعْنَاهِمَا

Artinya : Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³

Dalam UU No.1/197 pasal 1 berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS.Ar-Rum ayat 21).

Secara harfiah *sirri* itu artinya *rahasia*. Jadi nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum nikah sirri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai

³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid V hlm 8.

⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari UU No.1 Th 197*, (Jakarta: Pt.Dian Rakyat, 1986) hlm . 19.

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2017) hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan agama dalam hal ini ajaran Islam namun karena berbagai hal menghalanginya menjadi tidak terjadi pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Dalam aspek kultural dan sosial di masyarakat (Indonesia) pernikahan sirri dipahami sebagai suatu pernikahan yang dilangsungkan secara diam-diam tanpa menyebarkan berita pernikahannya kepada khalayak ramai.

Adapun pernikahan sirri di beberapa kasus dilakukan tanpa melibatkan wali dari salah satu/kedua belah pihak calon suami-isteri dan/atau kehadiran saksi dalam prosesi pernikahan. Pernikahan sirri secara umum diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan tanpa melalui prosedur pencatan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun dalam konteks masyarakat nikah sirri dimaksudkan nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada kantor urusan agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif Indonesia sebagaimana yang diatur undang undang perkawinan. Banyak faktor penyebab seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatat sipil Negara. Ada karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah sirri menurut hukum Islam atau secara agama adalah sah atau legal dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri dilaksanakan. Pada prinsipnya, selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati para ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah nabi saw, yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW :

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ

Artinya : “Umumkanlah pernikahan ini, jadikan tempatnya di dalam masjid dan pukulkan atasnya duff (rebana-rebana)”. (HR. Tirmidzi)⁶

Secara mendasar tidak dilihat dari tabuhan rebananya, melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarluaskan berita tentang acara pernikahan yang diselenggarakan.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan ulama. Hanya saja nikah sirri dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun nikah dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimah al – ursy. Berikut pendapat ulama Islam tentang nikah sirri.

1. Mazhab Hanafiyah

⁶ Vivi Kurniawati, *Nikah Sirri*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), cet ke-1. hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan sirri adalah pernikahan yang diharamkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah SAW yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan.

2. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Kalangan mazhab ini juga tidak membolehkan praktik nikah sirri. Menyiarkannya adalah lebih disukai.

3. Mazhab Hanabilah

Menurut mazhab Hahabilah, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskiun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukuman had.⁷

4. Mazhab Malikiyah nikah sirri ialah :

هُوَ الَّذِي يُؤْصِي فِيهِ الزَّوْجُ الشَّهَادَةَ عَنْ أَمْرٍ تَبِي. أَوْ عَنْ جَمَاعَةٍ وَلَوْ أَهْلَ مَنْزِلٍ

Artinya : “Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat”.

Mazhab maliki tidak membolehkan nikah sirri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman *had* (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan dilakukannya dengan kesaksian empat orang saksi.⁸

Sedangkan menurut Husein Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirri

⁷ *Ibid*, hlm. 23

⁸ Wahbah az – zuhaili, *Fiqh al Islam wa 'adillatuh*, juz VIII cet. III, Beirut, dar al – fikr, 1989 hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan pihak si perempuan sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. Menurut kalangan ulama syiah membolehkan nikah sirri lebih baik ketimbang berzina yang sangat dilaknat oleh Allah SWT.

1. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara sirri adalah Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka Islam. Ia berpendapat bahwa nikah sirri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
2. Dadang Hawari, mengharamkan nikah sirri. Sedangkan Tochiri Tohir berpendapat nikah sirri sah dan halal, karena Islam tidak pernah mewajibkan sebuah pernikahan harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah sirri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindarkan zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah sirri hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah sirri semacam itu tetap sah secara agama. Namun, perkawinannya menjadi tidak berkah.
3. Menurut Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan direktur pembinaan badan peradilan agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, mengatakan bahwa ajaran Islam, nikah sirri tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu. Nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu agama, hukum dan social.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika dilihat dari satu aspek saja maka pincang.⁹

4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatat nikah yang ditetapkan melalui undang undang. Di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.¹⁰ Sesuai firman Allah SWT dalam Qur'an surah An – Nisa ayat 59 :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada dasarnya fungsi pencatatan nikah pada lembaga pencatat sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti dianggap absah sebagai bukti syar'i (bayyinah syar'iiyyah) dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil tentunya seorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti di hadapan majlis peradilan. Ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan,

⁹ Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, Mimbar Hukum, No. 28, 1996, hlm. 20

¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan al qur'an Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, (Jakarta:mizan,1998), cet.VIII , hlm l 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan. Seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara, bukanlah satu satunya alat bukti syar'i. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga sah dan diakui oleh Negara sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah sirri tetap memiliki hubungan perwarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan sirri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatat sipil atau tidak mengakui hubungan perwarisan nasab dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan tersebut.

Pada era keemasan Islam dimana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan sirri atau yang tidak tercatat pada lembaga pencatatan resmi negara. Kebanyakan masyarakat pada saat itu melakukan pernikahan tanpa dicatat lembaga pencatatan sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatn belum berkembang. Dan keadaan masyarakatnya saat itu belum sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum muslim saat itu memahami bahwa hukum pencatat nikah bukanlah wajib akan tetap mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syar'i bukan hanya dokumen tertulis.

Di Indonesia telah terjadi pembaharuan hukum di bidang hukum keluarga, dengan disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU ini, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. "Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan

¹¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan selain Islam cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975” dengan dicatat di kantor catatan sipil.¹²

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi.

Secara etimologi, kata sirri berasal dari bahasa arab *sirru* yang berarti rahasia. Dalam aspek kultural dan sosial di masyarakat (Indonesia) pernikahan sirri dipahami sebagai suatu pernikahan yang dilangsungkan secara diam-diam tanpa menyebarkan berita pernikahannya tersebut kepada khalayak ramai. Adapun pernikahan sirri di beberapa kasus dilakukan tanpa melibatkan wali dari salah satu/kedua belah pihak calon suami-isteri dan/atau kehadiran saksi dalam prosesi pernikahan. Pernikahan sirri secara umum diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan tanpa melalui prosedur pencatan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebagai contoh, kasus nikah sirri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT. Fenomena yang terjadi, pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah, *ulil*

¹² *Ibid.*, hlm 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amri, yang dalam hal ini mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama lebih penting. Karena mengandung unsur *ukhrawi* yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dari sinilah kemudian kasus nikah sirri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri di Indonesia khususnya nikah sirri terjadi di kota Dumai.

Wali Nikah, dari sekian banyak syarat dan rukun untuk syahnya perkawinan menurut hukum Islam, Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya.

Keberadaan wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana keberadaan saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki laki, mukallaf merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna.

Mengenai masalah perwalian, di Indonesia menganut ajaran syafii yang mengatakan perlu adanya wali nikah bagi pihak wanita. Dan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan. Tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tidak sah.

Dalam hukum Islam apabila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan maka pernikahan itu sah, dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai hukum acara peradilan Agama juga menjelaskan persoalan wali nikah dalam pasal 19 KHI, yang didalamnya disebutkan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wali Nikah dalam Perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

Karena kedudukannya yang sangat penting dan menentukan, maka tidak sembarang orang dapat menjadi wali nikah walaupun dalam nikah sirri.

Sedangkan sahnya perkawinan dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹³ dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.¹⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai hukum acara oleh pengadilan agama dalam pasal 5 ayat 1 berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, ayat 2 pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang –undang no 22 tahun 1946 jo undang –undang no 32..

¹³ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), cet. ke-1 hlm. 67.

¹⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986) cet. ke-1. hlm. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan bagi yang melakukan nikah yang tidak tercatat di KUA agar nikahnya di catat dan diakui oleh Negara maka bisa melakukan isbat nikah di pengadilan agama. Seperti yang disebutkan dalam KHI pasal 7 :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Masyarakat kota Dumai yang melakukan pernikahan sirri atau pernikahannya tidak tercatat oleh negara dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama tentunya walinya telah memenuhi rukun dan syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. maka dapat disyahkan perkawinannya melalui Isbat Nikah (penegasan nikah), Namun dalam beberapa kasus pernikahan sirri yang mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama yang mana wali dalam pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan juga dapat disyahkan oleh Pengadilan Agama Kota Dumai seperti halnya perkara isbat nomor 0015/Pdt.P/2017/PA Dum atas nama Sapar harahap bin Ranto dengan Masroni nasution binti Rongga. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis ingin mengadakan suatu penelitian dengan judul **ANALISA KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ISTBAT NIKAH SIRRI WALINYA TIDAK MEMENUHI SYARAT PERNIKAHAN.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada masalah penyelesaian nikah tidak tercatat di KUA yang walinya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan melalui isbat nikah di pengadilan agama kota dumai. Putusan perkara isbat nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana majelis hakim Pengadilan Agama Dumai menetapkan itsbat nikah yang walinya tidak memenuhi syarat pernikahan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana analisa terhadap putusan perkara isbat nomor 0015/Pdt.P/2017/PA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dumai ?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian**1. Tujuan penelitian**

Adapun sebagai tujuan penulis pada penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui hasil penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Dumai dalam menetapkan itsbat nikah pernikahan tidak tercatat di KUA yang walinya tidak memenuhi syarat pernikahan.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar dan pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kota Dumai dalam memutuskan perkara itsbat nikah tersebut.
- c. Untuk mengetahui itsbat nikah yang diatur dalam hukum Islam dan perundang - undangan

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Bagi mahasiswa, syariah terutama hukum keluarga dapat mengetahui mengenai hal-hal tentang hukum perkawinan nikah sirri dalam hukum Islam dan hukum Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi masyarakat, dapat lebih teliti dalam pelaksanaan nikah dan penegakan hukum pernikahan dalam perspektif islam dan hukum Indonesia
- c. Bagi penulis, pengembangan wawasan pengetahuan penulis dalam bidang karya ilmiah terutama masalah hukum keluarga di bidang pernikahan dalam hukum Islam dan hukum Undang Undang Negara

E. Metode penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Dumai. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian karena putusan isbat yang dikelurkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Dumai.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Dumai, Objek penelitian ini adalah putusan isbat nikah dari majelis hakim Pengadilan Agama Kota Dumai.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.¹⁵ Oleh sebab itu dalam penelitian ini adalah majelis hakim serta staff, dan pasangan yang di itsbat nikah kan di Pengadilan Agama Dumai. Penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *total sampling*.

¹⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2010) cet ke III, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari pihak yang mengajukan isbat nikah dan yang sudah di isbatkan oleh Pengadilan Agama Dumai

b. Data Skunder

Data skunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak/sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam penulisan ini serta buku-buku, majalah, artikel dan kamus yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada majelis hakim Pengadilan Agama Dumai, Kantor dan Urusan Agama, dalam hal ini wawancara penulis di tujukan pada majelis hakim Pengadilan Agama Dumai yang telah mengeluarkan putusan isbat.

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu setelah data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkumpul, data tersebut di klasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, di hubungkan antara satu dengan yang lain, serta di bandingkan, sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang di teliti
- b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari Geografis, Demografis, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Dumai.

BAB III membahas tentang pengertian pernikahan sirri sebab dan akibat pernikahan sirri, serta pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. membahas tinjauan umum tentang Itsbat Nikah, pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itsbat nikah dan Dasar Hukumnya, Syarat dan Prosedur Itsbat Nikah. Serta Akibat Hukum Itsbat nikah

BAB IV berisikan tentang Analisa Penetapan Pengadilan Agama Dumai, Duduknya Perkara, Pertimbangan hukumnya, Penetapan Majelis Hakim Terhadap Putusan Perkara Istbat Nikah Sirri Wali Yang Tidak Memenuhi Syarat Pernikahan, Serta analisa hukum.

BAB V merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi dari Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dianggap perlu berkaitan dengan penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura, yang di undangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99, maka Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah di Sumatera. Dalam Penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersama yakni Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis dan Tanjung Pinang.

Selanjutnya pada tahun 1982 adalah merupakan era awal mulai terbentuknya Pengadilan Agama Dumai, yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1982, tentang pedirian beberapa Pengadilan Agama, termasuk diantaranya Pengadilan Agama Dumai.

Pada tahun 1983 dan tahun 1984 merupakan tahun era pendirian dan pengoperasian Pengadilan Agama Dumai secara resmi, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, maka pada tahun 1984 Pengadilan Agama Dumai mulai beroperasi secara resmi, diawali dengan dilantiknnya Bapak Kamilun Anwar sebagai Ketua, Drs. M. Nasir Mas, Sebagai Panitera

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala, dan Drs. Lumban Hutabarat sebagai Hakim, pada tanggal 1 April 1983, dan pengoperasian Pengadilan Agama Dumai secara efektif adalah pada tanggal 1 April 1984, dan atas dasar itulah maka hari jadi Pengadilan Agama Dumai ditetapkan pada tanggal 1 April 1984.

Pada tahun pertama beroperasinya Pengadilan Agama Dumai menempati atau menyewa rumah warga sebagai kantor sementara, yang terletak di Jalan Nuri Nomor 5, Kota Dumai, sambil menunggu selesainya pembangunan gedung Pengadilan Agama Dumai yang sebenarnya.

Selama satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 April 1985, Pengadilan Agama Dumai telah menempati gedungnya sendiri yang terletak di Jalan Sudirman, tepatnya di belakang pasar Lepin, dengan bangunan semi permanen seluas 220 M². kendatipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan sarana dan prasarana.

Lantaran karena letak dan lokasinya yang kurang representative, diantaranya karena bukan di jalan utama kota, sehingga tidak mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat, dan ditambah lagi karena lokasi tersebut sangat rawan banjir, maka pada tahun 2000 telah diupayakan relokasi gedung kantor ke lokasi yang lebih layak. Upaya tersebut mendapat tanggapan dan respon positif dari berbagai kalangan yang diantaranya:

1. Dukungan dari DPRD Kota Dumai melalui surat Nomor: 2018/DPRD/IX/2000 tanggal 14 Desember 2000.
2. Dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Dumai Nomor: 050/BAPPEKO-PP II/2001/216 tanggal 17 Oktober 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Pengadilan Agama Dumai menyampaikan permohonan penyediaan lahan kepada Pemerintah setempat, dan surat permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Walikota Dumai dengan surat nomor: 100/TP/2001/283 tanggal 14 Maret 2001, serta surat penyediaan lahan dari Camat Dumai Timur dengan surat nomor: 100/PEM/DT/V/43 tanggal 1 Mei 2001.

Berdasarkan surat penyediaan lahan dan Camat Dumai Timur Nomor : 100/PEM/DT/V/43 tanggal 1 Mei 2001, bahwa Pemerintah Kota Dumai telah melakukan pemantauan lokasi yang telah disesuaikan dengan rencana tata ruang Kota Dumai, rencana pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Dumai bertempat di Jalan Puteri Tujuh Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Lokasi tersebut cukup strategis dan representative, karena terletak dikawasan perkantoran Kota Dumai, di jalan utama/protokol, dan ditengah jantung Kota Dumai, sehingga diharapkan Pengadilan Agama Dumai akan lebih mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat pencari keadilan.

Adapun luas lahan yang telah diperuntukkan untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Dumai tersebut adalah seluas 5.000 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pemda (LAMR) 100
Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor PBB (Kemenkeu) 100
Meter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Barat berbatas dengan Pemda/Rumah warga 50 Meter
- Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan raya Puteri Tujuh 50 Meter

Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Dumai dibangun dengan anggaran Mahkamah Agung RI melalui DIPA Pengadilan Agama Dumai dengan dua tahap pembangunan, tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2005 dengan luas bangunan 260 M2 yang terdiri dari dua lantai, dan tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2006 dengan luas bangunan 360 M2 yang terdiri dari dua lantai, sehingga total luas bangunan kantor Pengadilan Agama Dumai adalah seluas 620 M2.

Selanjutnya pada tahun 2013 Pengadilan Agama Dumai menerima bantuan hibah dari Masyarakat Kota Dumai yaitu pembangunan sarana ibadah berupa bangunan musholla seluas 81 M2 atau 9 x 9 M. sehingga luas pekarangan dan ditambah dengan fasilitas olahraga Pengadilan Agama Dumai adalah seluas 4.609 M2.

Sebagian besar wilayah Kota Dumai adalah lokasi intalasi perminyakan milik Pemerintah Republik Indonesiac.q. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, yang telah dikontrakkan atau dipinjam pakaikan kepada PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) untuk jangka waktu tertentu.

Namun sebagian lahan yang telah dikontrakkan tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh PT. Chevron Pasifik Indonesia sebagai lahan operasinya, sehingga dapat pula dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Dumai untuk berbagai kegunaan yang diantaranya untuk gedung kantor pemerintah, fasilitas ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Termasuk lahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperuntukkan untuk bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Dumai seluas 5.000 M2 adalah lahan yang telah dikontrakkan kepada PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) namun sudah tidak dimanfaatkan lagi.

Akhirnya untuk kepentingan tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, lahan seluas 5000 M2 yang semula merupakan asset kementerian ESDM yang telah di kontrakkan kepada PT. Chevron Pasifik Indonesia yang telah dimanfaatkan untuk gedung kantor Pengadilan Agama Dumai, Saat ini sedang menunggu proses alih fungsi lahan dari Kementerian ESDM kepada Mahkamah Agung RI c/q Pengadilan Agama Dumai.

Seiring dengan berjalannya waktu Pengadilan Agama Dumai telah mendapatkan kepercayaan masyarakat yang sangat luas, khususnya dari pencari keadilan, sehingga dari tahun ke tahun jumlah perkara semakin meningkat.

Untuk itu yang selama ini Pengadilan Agama Dumai kelasnya adalah kelas II, maka diusukan kenaikan kelas menjadi kelas I B. dan pada Tahun 2017 resmilah Pengadilan Agama Dumai menjadi kelas I B dengan Surat KEMENPAN RB No. B/10/M.KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Peningkatan kelas/Type 118 (Seratus Delapan belas) Pengadilan dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. dan ditindaklanjuti dengan surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 37/KMA/SK/11/2017 tentang pengangkatan kelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada 29 PA kelas II menjadi kelas IB, dan 21 Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi kelas I A.¹⁶

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 bahwa Pengadilan Agama Dumai terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera/sekretaris, panitera pengganti dan jurusita. Berikut perinciannya :

a. Ketua dan Wakil

No	Nama	Jabatan
1.	Drs.Ahmad Sayuti, MH	Ketua
2.		Wakil

b. Hakim

1.	Alfiza, S.H.I., M.A.	Hakim
2.	T.Mufardisshadri, S.H.I.	Hakim
3.	Sudarman, S.Ag., M.H.	Hakim
4.	Zulfadli, S.H.I., M.H.	Hakim
5.	Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.	Hakim
6.	Badrul Jamal, S.H., M.H.	Hakim

c. Panitera/Sekretaris dan Kasubag

1.	Drs. Bulgani	Panitera
2.	Muhammad Yanis, S.Ag	Sekretaris
3.	Zainudin Koromot, S.H	Panmud Hukum
4.	Murzani, S.Ag	Panmud Gugatan

¹⁶<http://pa-dumai.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses ada 16 Maret 2019 jam 4:26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Dra. Rohaya	Panmud Permohonan
6.	Anita Yusraida, S.Kom	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan
7.	Nurmala	Kasubag Pegawai dan Ortala
8.	Elizarti, S.H.I	Kasubag Umum dan Keuangan

d. Panitera Pengganti

1.	Dra. Asiwati	Panitera Pengganti
----	--------------	--------------------

e. Jurusita/Jurusita Pengganti

1.	Drs. Zakaria Wahid	Jurusita
2.	Majdy Hafizhuddin, S.Sy., M.H.	Jurusita Pengganti
3.	Indra Gunawan, S.Ag., M.Ag.	Jurusita Pengganti
4.	Jefi Efrianti, S.H., M.H	Jurusita Pengganti

f. Bendahara¹⁷

1.	Indriati Wahyusari	Bendahara
----	--------------------	-----------

C. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Dumai¹⁸

KOTA DUMAI		
No	KECAMATAN	KELURAHAN
1	KECAMATAN DUMAI TIMUR	1. Kel.Teluk Binjai 2. Kel. Buluh Kasap 3. Kel. Jayamukti 4. Kel. Tanjung Palas 5. Kel. Bukit Batrem
2	KECAMATAN DUMAI BARAT	1. Kel. Pangkalan Sesai 2. Kel. Simpang Tetap Darul Ihsan 3. Kel. Purnama 4. Kel. Bagan Keladi

¹⁷ Data dari Pengadilan Agama Dumai

¹⁸ <http://pa-dumai.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> 4:26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	KECAMATAN DUMAI KOTA	1. Kel. Datuk Laksamana 2. Kel. Rimba Sekampung 3. Kel. Dumai Kota 4. Kel. Bintang 5. Kel. Sukajadi
4	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1. Kel. Ratu Sima 2. Kel. Bumi Ayu 3. Kel. Bukit Datuk 4. Kel. Bukit Timah 5. Kel. Mekar Sari
5	KECAMATAN BUKIT KAPUR	1. Kel. Bagan Besar 2. Kel. Bukit Nenas 3. Kel. Bukit Kayu Kapur 4. Kel. Kampung Baru 5. Kel. Gurun Panjang
6	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	1. Kel. Bangsal Aceh 2. Kel. Lubuk Gaung 3. Kel. Tanjung Penyembal 4. Kel. Basilam Baru 5. Kel. Batu Teritip
7	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1. Kel. Mundam 2. Kel. Teluk Makmur 3. Kel. Guntung 4. Kel. Pelintung

D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Dumai

Pengadilan Agama Dumai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah
- Ekonomi syari'ah.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

Yang dimaksud dengan "shadagah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syari'ah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
- c. Asuransi Syari'ah;
- d. Reasuransi Syari'ah;
- e. Reksadana Syari'ah;
- f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- g. Sekuritas Syari'ah;
- h. Pembiayaan Syari'ah;
- i. Pegadaian Syari'ah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
- k. Bisnis Syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya :
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.¹⁹

¹⁹ <http://pa-dumai.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

HUKUM PERNIKAHAN SIRRI

A. Pengertian Nikah Sirri

Pengertian nikah sirri dari segi etimologi kata sirri berasal dari bahasa arab, yang arti harfiahnya adalah “rahasia”.²⁰ Jadi nikah sirri artinya pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia atau diam-diam (*secret marriage*). Menurut terminology fiqh Maliki nikah sirri adalah: Nikah dimana para saksi dipesan oleh suami agar merahasiakan pernikahan ini untuk istrinya atau jama’ahnya, sekalipun keluarga setempat.²¹

Nikah sirri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan Nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.²²

Menurut A. Zuhdi Muhdlor, nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karena pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga suami-isteri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.²³

²⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998), hlm 167

²¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al Islami wa Adilatuhi*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), vol. VII, hlm. 71.

²² Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, (Surabaya: Quntum Media, 2011), hlm 12.

²³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (NTC&R)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. 1, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Masjfuk Zhuhdi perkembangan pengertian dan praktek nikah sirri dikalangan masyarakat Islam Indonesia, paling tidak ada tiga tipe atau bentuk, yaitu:

Pertama, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam (telah terpenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh PPN dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (*walimatul ursy*). Suami isteri belum tinggal bersama karena isteri belum dewasa.

Kedua, nikah yang dilangsungkan menurut syari'at islam (memenuhi syarat dan rukun nikah), dihadapkan PPN dan telah memperoleh salinan akta nikah, namun masih bersifat intern keluarga belum diadakan resepsi pernikahan. Suami-isteri pun belum tinggal bersama.

Ketiga, nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam saja, namun karena terbentur PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990. Pernikahan tersebut dilangsungkan secara diam-diam dan dirahasiakan untuk menghindari hukuman disiplin.

Dari ketiga bentuk atau tipe nikah di atas, menurut Masjfuk Zuhdi yang mengandung pengertian sirri adalah tipe yang ketiga.²⁴ Senada dengan pendapat di atas, Moh. Daud Ali mengemukakan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang disengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain.

²⁴ A. Ghani Abdullah, Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan. Mimbar Hukum No. 23 Thn VI 1995 November-Desember, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perkawinan di bawah tangan (nikah sirri) adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan di catatan sipil dan non muslim. Sedangkan bagi orang muslim perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA)²⁵ Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan hanya berdasarkan ketentuan agama saja tanpa adanya pencatatan oleh pegawai pencatat nikah (PPN).

Menurut pasal 81 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (BW) perkawinan menurut upacara keagamaan baru dapat dilangsungkan setelah perkawinan di muka Pegawai Catatan Sipil.²⁶

Menurut KH. Ma'ruf Amin, Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa sengaja memakai istilah nikah di bawah tangan. Selain untuk membedakan pernikahan sirri yang sudah dikenal di masyarakat. Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama islam. Menurutnya penyebutan dengan istilah nikah di bawah tangan untuk membedakan dengan nikah sirri yang mempunyai konotasi lain. Kalau nikah sirri, dalam pengertian nikah yang dilakukan hanya berdua saja tidak memakai syarat dan rukun nikah lainnya. Bisa dipastikan pernikahan semacam ini tidak sah.

Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam

²⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁶ Ali Afandi. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian: menurut KUH Perdata (BW), (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), cet. Ke-3, hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh atau hukum Islam. Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.²⁷

Menurut Fatwa Syekh al-Azhar yang dijabat oleh Syekh Dr. Jaad al-Haq dalam fatwa ulama tersebut apa yang dimaksud dengan *az-zawaj al-urfy* adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku. Dalam hal ini Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

1. Peraturan *syara* yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai madzhab. Menurutnya ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsurunsur tersebut telah secara sempurnatelah terpenuhi maka akad nikah itu secara *syara* telah dianggap sah.
2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'i* nikahnya sudah dianggap sah

²⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam.²⁸

Fatwa Syekh al-Azhar tersebut tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di suatu negara, sebab dalam fatwanya beliau mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa pendapat dan persepsi masyarakat tentang nikah sirri di atas, penulis berkesimpulan bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam (terpenuhinya syarat dan rukun). Namun, karena sesuatu hal pernikahan itu dilakukan secara diam-diam dan dirahasiakan oleh para saksi agar tidak diketahui oleh orang lain, belum di catatkan oleh PPN, dan belum diadakan *walimatul ursyi*, hanya keluarga saja yang mengetahui pernikahan tersebut.

B. Sebab dan akibat Pernikahan Sirri

Praktek perkawinan Sirri (bawah tangan) hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi perempuan serta tidak melindungi hak-hak kaum perempuan dan juga hak anak.²⁹

Pernikahan sirri yang tidak dicatatkan, dipandang dan seringkali menimbulkan dampak negatif (*madlarrah*) terhadap istri atau anak yang

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah), (Jakarta: Kencana, 2004), cet. Ke-1, hlm. 33-34.

²⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain-lain. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Ada beberapa faktor penyebab seseorang dapat melakukan pernikahan sirri yang tersebar di masyarakat kita yang dikemukakan oleh Muhammad Fuad Syakir, yaitu:³⁰

1. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara syariat, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal, disebabkan pengangguran dan tidak adanya kesempatan kerja yang layak.
2. Ikut-ikutan kelompok masyarakat yang menyimpang yang dikuasai oleh mass media yang rusak melalui alat teknologi yang canggih dan merebaknya pemikiran yang menyimpang, seperti yang disebarkan oleh telenovela, filmfilm, dan buku-buku.
3. Merosotnya derajat perempuan karena pekerjaan yang digelutinya tidak sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan, seperti pekerjaan yang menghabiskan waktu sampai malam, dan pekerjaan yang mengharuskan ia selalu bersama atasannya, atau pekerjaan yang terlepas dari penjagaan.
4. Lemahnya benteng agama dan akidah, dan kurangnya pembinaan keluarga untuk mengarahkan kepada akhlak yang mulia, seperti yang dilakukan oleh salaf as-shaleh (pendahulu yang sholeh).

³⁰ Muhammad Fu'ad Syakir, Perkawinan terlarang: al-misyar (kawin perjalanan), al-urfi (kawin bawah tangan), as-sirri (kawin rahasia), al-mut'ah (kawin kontrak). Penerjemah Fauzun Jamal & Alimin, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1997), hlm. 55-57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Keluarga yang rusak (broken home) karena kesibukan orang tua sehingga mengabaikan urusan anaknya, orang tua tidak lagi memperhatikan ketidakhadiran atau keterlambatan atau anaknya kerumah, hal demikian bukan lagi suatu kegelisahan bagi orang tua dalam keluarganya, seperti masa dulu.
6. Sekolah-sekolah maupun universitas-universitas tidak lagi menekankan pembangunan akhlak, nilai-nilai dan mental agama, hal-hal tersebut hanya menjadi bahan bacaan yang mandul dan tidak terealisasi dalam kehidupan.
7. kurangnya perhatian kepada mata pelajaran agama yang benar terhadap generasi muda, sehingga bisa menghindarkan mereka dari pemahaman yang terlalu fanatis atau terlalu meremehkan, kurang mebiasakan mereka bersikap sesuai dengan aturan-aturan agama dalam kehidupan.
8. Hubungan laki-laki dan perempuan yang keluar dari batas kerja atau batas sekolah (belajar).
9. Pemahaman yang salah terhadap kebebasan pribadi di kalangan remaja, mereka mengartikan kebebasan adalah, Tidak boleh ada yang mengarahkan mereka, meskipun untuk mengarahkan perilaku mereka atau pengontrolan, sementara di kalangan perempuan berpendapat bahwa mereka mempunyai hak yang sama dalam berbuat seperti laki-laki di alam kebebasan ini, tanpa batas-batas dan nilai.
10. Club-club anak muda dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak terkontrol sebaik mungkin, sehingga sebagian besar menjadi tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan terlarang dan tempat santai yang remang-remang, bahkan memberikan nama jelek terhadap club dan perkumpulan tersebut karena ikut memberikan kontribusi dalam melepaskan ikatan moral, sehingga hanya dikenal sebagai tempat pertemuan laki-laki dan perempuan.

11. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan, hingga penyimpangan moral menjadi suatu perbuatan yang tidak ditakuti, karena resikonya bisa dihindari.
12. Klinik-klinik yang mencurigakan, yang memberikan pelayanan pengguguran dan pengembalian selaput darah bagi yang terlanjur hamil karena perbuatan zina.
13. Para pengacara yang tidak amanah yang memberikan pembelaan bagi yang melakukan pekerjaan yang hina ini, untuk mendapatkan materi, pembelaan ini diberikan kepada konglomerat yang datang ke negeri ini, untuk mendapatkan gadis yang seumur anaknya dan melayaninya di flat yang tersedia, agar tidak menjadi permasalahan di hadapan hukum, mereka membuat kontrak dengan pengacara-pengacara sampai waktu mereka pulang ke negerinya.

Adapun akibat-akibat dari Pernikahan Sirri, yaitu:³¹

1. Banyak masyarakat yang telah mengetahui apa yang menimpa barat di sebabkan pengaruh kebebasan, seperti mewabahnya penyakit-penyakit seksual.

³¹ *Ibid.*, hlm 57-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bermunculannya anak-anak tanpa keturunan di masyarakat yang bebas, sehingga menjadi krisis yang sulit ditemukan penyelesaiannya.
3. Perilaku amoral yang menggiring diri terbenam dalam kehidupan materi, hilangnya perasaan dan menjadi pribadi yang bebal.
4. Kebebasan tanpa batas telah merusak kelompok masyarakat yang berusaha mendapatkan kebebasan tersebut, sementara kelompok masyarakat yang telah rusak itu akan merusak kelompok masyarakat yang lain.
5. Melebarnya jurang pemisah antara anggota masyarakat, hingga menjadi sebuah hubungan yang egois, jauh dari tolong-menolong, gotong-royong, dan persaudaraan.
6. Secara hukum kenegaraan, tidak diakuinya hak-hak keperdataan yang ditimbulkan oleh pertalian hubungan perkawinan, tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia. Disamping itu juga tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.³²
7. Tidak adanya pengakuan hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami istri pelaku nikah sirri. Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya,

³² Asrorun Ni'am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, hlm. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Sebagaimana ketentuan pasal 42-43 UU No. 1 Tahun 1974.³³ Serta pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.³⁴

C. Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam

Menurut Ibnu Taimiyah, apabila laki-laki mengawini perempuan dengan cara *mushafalah* yaitu nikah sirri tanpa wali dan saksi, serta merahasiakan pernikahan, maka menurut kesepakatan para Imam pernikahan itu bathil, bahkan menurut para ulama, karena:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ³⁵

Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali.

أَيُّمَا مَرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : perempuan yang mana saja kawin tanpa izin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal.³⁶

Kedua lafadz ini *ma'tsur* dalam kitab sunan dari Nabi SAW, dan beberapa orang ulama salaf mengatakan: "tidak ada pernikahan melainkan dengan saksi". Demikian ini pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad,

³³ Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pasal 43: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

³⁴ Pasal 100 KHI: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

³⁵ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-ma'rifah : 1423 H/ 2002 m), hlm. 461.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 461.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang Malik mewajibkan meramaikan pernikahan. Pernikahan sirri sejenis pernikahan pelacur, Allah SWT berfirman:

.....مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ..... ج

Artinya : Mereka perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. (Q.S. An-Nisaa: 25)

Maka pernikahan sirri itu termasuk jenis *dzawatil akhdan* (perempuan-perempuan yang mempunyai laki-laki piaraan). Maka disyariatkan laki-laki meminang untuk mengawini perempuan-perempuan. Oleh karena itu, diantara ulama salaf ada yang berpendapat bahwa perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya, dan sesungguhnya perempuan pelacur itu ialah yang menikahkan dirinya.³⁷

Dalam perjalanan hukum Islam nikah sirri bukanlah masalah yang baru karena di dalam kitab Al-Muwatha karya Imam Malik telah tercatat, bahwa istilah nikah sirri bersal dari perkataan Umar Ibnu al-Khattab r.a:

اخبرنا مالك, عن ابي زبير, ان عمر ي رجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة, فقال عمر : هذ نكاح الشير, ولا تجزه ولو كنت تقدمت فيه لرحمت³⁸

Artiya : Bahwasanya Umar dihadapkan kepadanya seorang laki laki yang menikah tanpa saksi, kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Umar berkata : ini nikah sirri, aku tidak membolehkannya, seandainya kamu melakukannya pasti aku rajam.

³⁷ bnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*. Penerjemah: Rusnan Yahya, (ed), Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), cet. 1, hlm. 202-203.

³⁸ Abi Abdillah Malik bin Anas Al-Asbahi, *Muwatha Imam Malik*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1967), juz 2, hlm. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian nikah sirri dalam perspektif Umar tersebut adalah bahwa syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang, maka nikah semacam ini memakai kriteria Umar dapat dipandang Nikah sir.³⁹ Dilihat dari keterangan nikah sirri tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa nikah sirri itu bersangkutan-paut dengan kedudukan saksi dan syarat-syarat pada saksi itu sendiri.

Para Ulama besar seperti Abu hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'I, juga tidak membolehkan nikah sirri, nikah sirri harus dibatalkan. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah sirri dan harus difasakh. Namun, Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan Ibnu mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja. Abu Hanifah dan Imam Syafi'I menilai nikah tersebut bukan sirri.⁴⁰

Ulama yang memandang tidak sah perkawinan yang dirahasiakan oleh para saksinya, mereka berdalil kepada :

1. Hadits Riwayat at-Turmudzi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda:

الْبَعَايَا أَلَّا تِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِيَعْرِ بَيَّةَ

Artinya : "Pelacur adalah wanita-wanita yang mengawinkan dirinya tanpa bukti"⁴¹

2. Hadits riwayat al-Daruqutni dari Aisyah:

³⁹ Mahful M. dan Herry Mohammad, *Fenomena Nikah Sirri*, (Jakarta: IKAPI, 1996), Cet-1, hlm. 31.

⁴⁰ M Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, (Surabaya: Pustaka Progresssif, 1996), hlm. 31-

34.

⁴¹ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-turmudzi*, hlm. 463.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَا هِدْيٍ عَدْلٍ⁴²

Artinya : "Rasulullah Saw bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil".

3. Karena Nikah tersebut berkaitan dengan hak para pihak yang mengadakan aqad, yaitu anak, maka disyaratkan adanya saksi, agar ayahnya tidak memboikot lalu mangaburkan atau menghilangkan hubungan nasab.

Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa nikah itu sah tanpa adanya para saksi, diantara mereka itu adalah orang-orang syiah, Abdurrahman Ibnu Mahdi, Dawud, dan yang telah mempraktekannya adalah Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Diriwayatkan dari Hasan Ibnu Ali, bahwa dia telah menikah tanpa saksi. Kemudian mengumumkan pernikahan itu.⁴³

Nikah sirri merupakan salah satu bentuk nikah yang masih diperdebatkan sah atau tidaknya oleh para Ulama. Berkaitan dengan hal ini terdapat 2 (dua) golongan Ulama. Golongan pertama menyatakan bahwa nikah sirri adalah sah, sedangkan golongan kedua menyatakan tidak sah.

1. Golongan Jumhur Ulama.

Mereka menyatakan bahwa jika para saksi yang hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak menyebarluaskan berita pernikahannya kepada khalayak ramai, maka perkawinannya tetap sah. Sebaliknya meskipun pernikahannya itu diumumkan atau disebarluaskan kepada khalayak ramai, tetapi ketika akad

⁴² Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nayl al-Authar VI, (Misr : Mustafa "Babi I" Halabi wa Auladuh, t.t), hlm. 256.

⁴³ M Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), hlm. 31-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung, tidak ada satu pun saksi yang menyaksikannya, maka perkawinan tersebut tidak sah.⁴⁴

Riwayat dari Abu Zubair al-Makky, bahwa Umar bin khattab menerima laporan adanya perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang pria dan wanita, lalu beliau menjawab: ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan dan andai kata saat itu aku hadir, tentu akan aku rajam (H.R. Malik dalam kitab al-Muwatha).²⁹ Karena nantinya akan ada seorang anak yang akan terlibat dalam hak kedua belah pihak yang menikah. Maka disyaratkan adanya saksi ketika akadnya, agar sang suami tidak mengingkari keturunannya kelak.

Lebih lanjut dikatakan oleh Imam Syafi‘I, Abu Hanifah, Ibnu Munzir, Umar, Urwah, Sya‘bi dan Nafi‘ bahwa apabila terjadi akad nikah tetapi dirahasiakan dan mereka pesan kepada yang hadir agar merahasiakannya pula, maka perkawinannya sah, tetapi makruh karena menyalahi adanya perintah untuk mengumumkan pernikahan.⁴⁵ Sabda Nabi SAW dari Aisyah:

أَعْلَنُوا أَنْكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ. (رواه الترمذي)⁴⁶

Artinya: Umumkanlah akad nikah ini dan laksanakanlah di masjid serta ramaikanlah dengan memukul rebana. (H.R. at-Tirmidzi)

2. Golongan Maliki

Mereka menyatakan bahwa saksi dalam pernikahan tidak wajib dan cukup diumumkan saja sebelum terjadi persenggamaan. Tetapi jika sebelum

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, (Bandung: PT. Al-ma‘arif, 1990), penerjemah Mohammad Thalib, Cet. Ke-7, hlm. 185.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 187.

⁴⁶ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut : Dar al-ma‘rifah : 1423 H/ 2002 M), hlm. 457.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad nikah diumumkan kepada khalayak ramai sudah terjadi persenggamaan, maka pernikahannya batal, meskipun saat akad dihadiri oleh para saksi.⁴⁷

Pendapat ini bertumpu pada pemikiran ketika memperbandingkan mengenai ketentuan bahwa akad nikah yang dipersaksiannya tidak disebut secara tegas dalam al-Qur'an dibanding dengan ketentuan mengenai akad jual beli mu'ajjal atau utang piutang yang disebut jelas dalam al-Baqarah: 282. kalau yang disebut yakni saksi akad jual beli saja ditemukan dalil menyatakan tidaklah wajib, maka untuk yang tidak disebut-sebut dalam hal ini saksi akad nikah, tentulah tidak wajib juga.⁴⁸

Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang saksi adalah:

1. Berakal sehat
2. Dewasa
3. Mendengar pembicaraan kedua belah pihak yang berakad
4. Memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah ijab qabul pernikahan.⁴⁹

Pernikahan yang ada unsur merahasiakan maka tergolong kelompok pernikahan yang tidak boleh (haram), maka agar pernikahan tersebut sah harus diumumkan kepada khalayak ramai (*i'lan*). Pengumuman tersebut berguna untuk menghindari akan tuduhan orang lain atau keraguan orang lain.

I'lanun nikah berarti menyiarkan atau mengumumkan kepada tetangga terdekat bahwa telah terjadi *aqduu al nikah* (akad nikah) antara

⁴⁷ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-1, hlm. 28.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dari keluarga si anu dengan laki-laki dari si pulan dengan mengucapkan ijab qabul.

Walimah dan *I'lanun* nikah sangat penting artinya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat demi untuk menjaga sangkaan atau kecurigaan yang tidak baik dari anggota masyarakat sekitarnya tentang pergaulan. Sebagaimana Hadis Rasul Allah yang diriwayatkan oleh at-Tarmidzi, berasal dari Siti Aisyah ra. "*I'linun nikaahawadhribu alaihi bil gharbali*" artinya: umumkanlah perkawinan itu dan pukullah gendang dalam hubungan dengan perkawinan itu.⁵⁰

Dari pembahasan diatas, ringkasnya Imam Hanafi, Imam Syafi'I, dan Imam Hambali mengharuskan adanya saksi dalam pernikahan, sedangkan Imam Malik dan jumhur Ulama lebih mengurgenkan saksi sebagai pengumuman.

b. Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan akan diakui dan mendapatkan legalitas dari negara apabila telah memenuhi dua syarat berikut:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil sebagaimana perintah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1), yaitu pernikahan telah dilangsungkan menurut aturan-aturan yang ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Maka bagi orang islam pernikahan itu

⁵⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. Ke-1, hlm. 48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (2), yaitu pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencata Nikah (PPN) yang berwenang dan telah memperoleh bukti otentik berupa akta nikah.

Nikah sirri merupakan nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan dilakukan secara diam-diam atau rahasia dari orang lain termasuk dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak dicatatkan. Dari sini dapat dipahami bahwa pernikahan sirri hanya baru memperoleh legalitas dari hukum Islam, karena hanya syarat materiilnya saja yang terpenuhi, sedangkan syarat formilnya belum terpenuhi sehingga selamanya dianggap oleh negara tidak pernah terjadi sebuah pernikahan. Atau dengan kata lain pernikahan tersebut tidak diakui dan tidak mendapatkan legalitas dari Negara.

Dilihat dari teori hukum yang menyatakan bahwa perbuatan hukum adalah tindakan seseorang yang dilakukan berdasarkan suatu ketentuan hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.⁵¹ Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang secara

⁵¹ Soedjono Dirojosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994) Cet Ke-4, hlm. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otomatis melahirkan akibat-akibat hukum serta diperlukan adanya kepastian hukum.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, dan pelaksanaannya secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 (pasal 67 No. 1/74 jo pasal 49 PP No. 9/75). Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁵²

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya Prof. Hazairin, S.H menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri.⁵³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mensahkan Pernikahan Sirri, karena sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik dengan menuruti perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, orang yang melakukan

⁵² Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1 / 1974*, (Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 1986), hlm. 5.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah sirri, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan diluar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak luar nikah.⁵⁴

Praktek perkawinan bawah tangan (sirri) hingga kini masih banyak terjadi. Padahal, perkawinan bawah tangan (sirri) berdampak sangat merugikan bagi perempuan serta tidak melindungi hak-hak kaum perempuan dan juga hak anak. Dan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ketentuan dalam KHI pasal 3 yang menyebutkan: *"Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*.⁵⁵

Secara yuridis, sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah "kawin bawah tangan" dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara sosilogis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku"*.

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan: *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat"*. Selanjutnya dikatakan didalam pasal 6 ayat (1): *"Untuk*

⁵⁴ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (NTC&R)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. 1, hlm. 12.

⁵⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2002), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Dan dalam ayat (2): ”Perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum”. Dan dianggap tidak sah di mata hukum.⁵⁶ Rumusan dalam pasal-pasal tersebut diatas menegaskan bahwa dalam memenuhi jaminan kepastian hukum, perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku guna memenuhi persyaratan administratif.

D. Hukum dan Syarat Itsbat Nikah**a. Pengertian Itsbat Nikah**

Itsbat Nikah merupakan gabungan dari dua kata yakni itsbat dan nikah. Itsbat merupakan kata masdar yang terambil dari kata أثبت-يثبت-إثباتا yang artinya mempunyai makna penetapan atau pembuktian.⁵⁷

Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵⁸ Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati

⁵⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (NTC&R)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. 1, hlm. 23.

⁵⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, hlm. 145.

⁵⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁹ Sedangkan definisi nikah menurut ulama fiqh yaitu: akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wat'i*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.⁶⁰

Dari penggabungan kalimat diatas dapat diartikan bahwa itsbat nikah adalah penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁶¹ Singkatnya itsbat nikah adalah penetapan oleh pengadilan atau perkawinan yang sah, tetapi tidak mempunyai akta nikah.

Definisi lain mengatakan bahwa itsbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan, pembuktian, atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan karena alasan-alasan tertentu.⁶²

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 64 berbunyi: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.⁶³ Dari ketentuan ini maka perkawinan yang ada sebelum Undang-undang ini berlaku adalah sah. Begitu juga masalah itsbat nikah pun tetap sah,

⁵⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2017) hlm. 50.

⁶⁰ Wahbah al Zuhailly, *al fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Damsiq: Dar al Fikr, 1989), hlm. 29.

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet ke-11, hlm. 339.

⁶² Yayan Sofyan, *Itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*. Ahkam IV, No. 8 (2002), hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itsbat nikah ini sudah ada dan melembaga dalam himpunan penetapan dan putusan Pengadilan Agama tahun 50-an.

Kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 desember 1989 yang menggantikan segala landasan hukum pengadilan agama sebelumnya, memang lembaga itsbat nikah tidak dimekarkan tetapi tidak berarti hilang. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (2) bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah persyaratan tentang sahnyanya perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Jadi lembaga itsbat nikah atau pengesahan nikah yang ditampung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terbatas pada alasan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan itsbat nikah/pengesahan nikah yang karena alasan-alasan lain tidak dimuat dan tidak ada pula penjelasan-penjelasan tentang ketidak bolehannya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mawaddah dan rahmah.⁶³ Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana di sebutkan didalam KHI tentang pencatatan perkawinan.

- Pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinannya harus dicatat.
- Pasal 5 ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22/1946 jo. Undang-Undang Nomor 32/1954.

Tehnik pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah .
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan galidzon*) perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.⁶⁴ Bukti perkawinan yang telah dicatatkan adalah

⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet Ke-5, hlm.114.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa Akta Nikah yang dapat dijadikan bukti otentik, bila suatu waktu di dalam perkawinan terjadi masalah.

Ahmad Rofiq berpendapat setidaknya ada dua manfaat dari pencatatan perkawinan yaitu manfaat *refresif* dan manfaat *preventif*.

Manfaat *refresif* dari pencatatan perkawinan adalah terbentuknya kesempatan *itsbat* (penetapan) bagi suami isteri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah (lihat pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam).

Manfaat *preventif* dari pencatatan perkawinan ialah untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut hukum agama maupun hukum perundang-undangan, dengan ini dapat dihindari pelanggaran terhadap kompilasi relatif pegawai pencatat perkawinan, atau menghindari terjadinya pemalsuan (penyimpangan hukum), seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama dan usia calon mempelai tersebut.⁶⁵ Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengaturnya dalam pasal 3 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilaksanakan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 111-112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan sipil Setempat.⁶⁶

Menurut Moh Idris Ramulyo, sampai saat ini peraturan pelaksanaannya belum ada. Apabila dilaksanakan menurut peraturan pelaksanaan perkawinan bagi orang-orang Islam tidak mungkin, karena mereka bukan orang Islam. Dilaksanakan menurut Kitab Undang-Undang Perdata juga tidak mungkin pula karena tidak diatur di dalam Undang-Undang tersebut, kecuali kalau mereka dapat diklasifikasikan ke dalam orang-orang non-Islam mungkin juga pejabat catatan sipil dapat melaksanakannya.⁶⁷

Pasal 5 berbunyi :

1. Pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin di sebutkan juga nama istri dan suami terdahulu. Kemudian dalam pasal 6 berbunyi:

⁶⁶ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan , *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1\1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 125

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
3. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengannya.
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

Ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas memberi manfaat yaitu: *pertama*, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif dari Pegawai Pencatat Nikah. *Kedua*, menghindari terjadinya pemalsuan atau penyimpangan seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka. Oleh karena itu, ketelitian Pegawai Pencatat Nikah sangat diperlukan dan menjadi faktor penentu tidak terjadinya penyimpangan.

Yang menjadi dasar hukum dari Itsbat Nikah adalah Bab XIII pasal 64 ketentuan peralihan undang-undang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I pasal 7, yang terkandung dalam pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan “itsbat nikah”.⁶⁸

Mengenai itsbat nikah ini ada Permenag Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama. Namun, aturan itu hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. Akan tetapi, Pasal 7 KHI ternyata memberi Pengadilan Agama kompetensi absolut yang sangat luas terhadap itsbat nikah.⁶⁹

Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama⁷⁰

Permohonan itsbat nikah menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami

⁶⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal : 64, hlm. 25.

⁶⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah> diakses pada tanggal 30 Maret jam 13:43

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet Ke-5, hlm. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁷¹

Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan sesuatu yang penting dalam Hukum Perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.....

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....

Para pemikir hukum Islam (*faqih*) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fiqh yang mengungkapkan *Darulmafasidu muqoddamun ala jalabil mashalih*.⁷² Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahat mursalah*) di negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari

⁷¹ Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29

⁷² Kaidah yang artinya menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat al-Quran yang berkaitan dengan mu'amalah (Surat Al-Baqarah ayat 282) dan maslahat mursalah dari perwujudan kemaslahatan.⁷³

Ayat di atas dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini berisi tentang penulisan utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁷⁴

Mengenai ayat ini, ulama berbeda pendapat tentang hukum pencatatan tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa pencatatan tersebut hukumnya tidak wajib karena ia hanya bersifat anjuran. Hal ini menurut Quraish Shihab berdasarkan praktek para sahabat Nabi ketika itu, keadaan kaum muslimin ketika turunnya ayat ini sangat langka yang memiliki kepandaian tulis menulis, maka jika perintah tersebut bersifat wajib tentunya akan sangat memberatkan. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup seorang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Hal ini diisyaratkan oleh penggunaan kata *لا* (apabila) yang ada pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukan kepastian akan terjadinya sesuatu.⁷⁵ Berdasarkan pendapat Quraish Shihab diatas, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi saat ini dimana

⁷³ Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 30

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 562-563.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 564-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepandaian tulis menulis sudah banyak, serta penggunaan pencatatan sebagai salah satu bukti yang diterima dimata hukum, maka pencatatan tersebut hukumnya dapat menjadi wajib.

b. Syarat dan Prosedur Itsbat Nikah

Pengesahan pengukuhan nikah (itsbat nikah) itu biasanya diperlukan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan pernikahan, yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah, seperti untuk mendapatkan pensiunan janda dan sebagainya. Untuk mensahkan pengakuan itu diperlukan persyaratan:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلِيٍّ امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشَوْرَ طُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَنَّا. (أها اعنة الطالبين ص ٢٥٤ جزء رابع).⁷⁶

Artinya: “Dalam pengesahan nikah seorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti: wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.”⁷⁷

Putusan tentang sah atau tidaknya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 64 yaitu: *Untuk perkawinan dan segala sesutau yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah*, dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini diatur mengenai itsbat nikah, yaitu pasal 7 yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

⁷⁶ Muhammad Syatha al- Dimyathi, *Hasyiah I' anatut thalibin*, (Indonesia: Dar Ihya al-kutub al-arabiyah, t,t), juz IV, hlm. 254

⁷⁷ Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, cet. Ke-1, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), h. 43. Dikutip dari kitab I' anatut Thalibin, juz IV, hlm. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan agama.
3. Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tetapi pasal 6 ayat 2 KHI menyebutkan: perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 56 ayat 3 KHI menyatakan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Berkaitan dengan perkara kewarisan, dalam hal terjadinya pernikahan sebelum adanya Undang-Undang No.1 tahun 1974, bila istri tidak mempunyai akta nikah, maka untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut kewarisan haruslah ada buku nikah, untuk itu si isteri harus mengajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Adapun dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan atas suatu itsbat nikah yang diajukan secara voluntair, maka pihak yang berkeberatan atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya itsbat nikah tersebut harus mengajukan bantahan ke Pengadilan Agama, baik sebelum atau sesudah itsbat nikah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itsbat nikah untuk perceraian bisa diputus bersama-sama, sepanjang para pihak dapat membuktikan tentang keadaan perkawinannya dengan terlebih dahulu memeriksa itsbat nikah, baru kemudian diperiksa dalil-dalil gugatan perceraian.

Oleh karena itu itsbat nikah yang patut diperkirakan menimbulkan efek yang lebih luas, misalnya: seorang istri mohon di itsbatkan pernikahannya dengan almarhum suaminya, maka patut diduga bahwa permohonan tersebut mempunyai tujuan lain, seperti menuntut harta bersama, harta warisan dan sebagainya. Dalam hal demikian pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama haruslah berbentuk surat gugatan *contentius* dengan mendudukkan ahli waris almarhum suaminya yang dapat di perkirakan berekeberatan dengan adanya itsbat nikah tersebut sebagai pihak tergugat.⁷⁸

Mengenai surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (penggugat dan tergugat), sedang dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada

⁷⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Teknisi Administrasi dan Teknisi di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 4 april, 2006), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristri lebih dari seorang.

Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis, bagi penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan/permohonan diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan Agama. Ketua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat/pemohon maka gugatan/permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua/hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) R. Bg atau pasal 120 HIR. Gugatan/permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat/pemohon (pasal 142 ayat (1) R. Bg/118 ayat (1) HIR). Jika penggugat/pemohon telah menunjuk kuasa khusus maka surat gugatan/permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (pasal 147 ayat (1) R. Bg/123 HIR).

Surat gugatan atau permohonan dibuat rangkap enam, masing-masing satu rangkap untuk penggugat/pemohon, satu rangkap untuk tergugat/termohon atau menurut kebutuhan dan empat rangkap untuk majlis hakim yang memeriksanya.

Apabila surat gugatan hanya dibuat satu rangkap, maka harus dibuat salinannya sejumlah yang diperlukan dan dilegalisir panitera. Adapun isi dari surat gugatan/permohonan yaitu:

1. Identitas para pihak (pemohon dan termohon)
 - a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Umur
 - c. Agama
 - d. Pekerjaan
 - e. Tempat tinggal. Bagi pihak yang tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis, "dahulu bertempat di....., tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia."
 - f. Kewarganegaraan (jika diperlukan)
2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita berisi:
 - a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum
 - b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam keputusan nanti.
3. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim.⁷⁹

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diajukan pada Sub Kepaniteraan Gugatan, sedang permohonan pada Sub Kepaniteraan Permohonan. Kemudian calon pemohon menghadap ke Meja I.⁸⁰

⁷⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 39-40.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meja I:
 - a. Menerima surat permohonan dan salinannya
 - b. Menaksir panjar biaya
 - c. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk membayar)
2. Kasir:
 - a. Menerima uang panjar dan pembukuan
 - b. Menandatangani SKUM
 - c. Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas
3. Meja II
 - a. Mendaftar gugatan dalam register
 - b. Memberi nomor perkara pada surat gugatan sesuai nomor SKUM
 - c. Menyerahkan kembali kepada penggugat satu helai surat gugat.
 - d. Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil Panitera- panitera
4. Ketua PA:
 - a. Mempelajari berkas
 - b. Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim)
5. Panitera:
 - a. Menunjuk panitera siding
 - b. Menyerahkan berkas kepada Majelis
6. Majelis Hakim:
 - a. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) + perintah memanggil para pihak oleh jurusita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyidangkan perkara.
7. Memberikan kepada meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
 - a. Memutus perkara
8. Meja III:
 - a. Menerima berkas yang telah diminta dari majelis hakim.
 - b. Memberikan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita.
 - c. Memberitahukan kepada Meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
 - d. Menetapkan kekuatan hukum.
9. Menyerahkan salinan kepada penggugat dan tergugat dan instansi terkait.
 - a. Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum
10. Panitera Muda Hukum:
 - a. Mendata perkara
 - b. Melaporkan perkara
 - c. Mengarsipkan berkas perkara.

Adapun cara mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang dipaparkan oleh Yayan Sofyan adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan di wilayah kekuasaan relatif Pengadilan Agama tersebut (wilayah tempat tinggalnya) dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Misalnya, surat keterangan dari rukun

⁸¹ Yayan Sofyan, *Itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*. Ahkam IV, No. 8 (2002), hlm. 76-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetangga (RT), rukun warga (RW), lurah/kepala desa setempat atau surat keterangan kehilangan akta nikah dari kepolisian bila akta nikah hilang.

2. Mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan agama dengan menyampaikan sebab-sebab pengajuan permohonan.
3. Membayar uang muka biaya perkara. Bagi yang tidak mampu membayar uang perkara, Pengadilan Agama bisa mengajukan prodeo (pembebasan biaya).
4. Membawa saksi-saksi yang diperlukan, yaitu orang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan yang telah terjadi, petugas atau orang yang menikahkan, para saksi perkawinan, orang-orang yang mengetahui adanya perkawinan itu.

d. Akibat Hukum Istbat Nikah

Setelah dikabulkan permohonan itsbat nikah, maka secara otomatis yang berkepentingan akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahan mereka yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya, itsbat nikah ini berfungsi sebagai kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri, dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil syahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak tercatat dan tidak pula diminta itsbat nikahnya maka kedudukan perkawinan itu adalah:

1. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
3. Tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri dan juga anak-anaknya.⁸²

UIN SUSKA RIAU

⁸² Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum No.28 Tahun VII, (Mei-Juni, 1996), hlm. 51-52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam menetapkan putusan isbat nikah sirri yang walinya tidak memenuhi syarat pernikahan. Majelis Hakim meminta para pihak untuk menunjukkan alat bukti di persidangan seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Ketika para pihak yang mengajukan isbat tidak bisa membuktikan salah satu syarat alat bukti. Maka majelis hakim meminta kepada pihak yang mengajukan untuk melakukan sumpah di dalam persidangan. Sumpah tersebut di namakan sumpah supleitoir. Disamping sumpah pelengkap tersebut majelis hakim juga menggunakan prasangkaan hakim dalam memutuskan perkara isbat tersebut.
2. Diketahui bahwa putusan perkara isbat nomor 0015/Pdt.P/2017/PA yang bertindak menjadi wali tersebut bukanlah abang kandung atau tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hak sebagai wali terhadap Masroni Nasution Binti Rongga. Namun, Pengadilan Agama Dumai dalam putusannya tetap melakukan isbat nikah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan rukun perkawinan dan juga dengan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai Rujukan bagi Pengadilan Agama. Seharusnya pihak pengadilan agama lebih teliti dalam hal memeriksa para pemohon yang ingin mengajukan isbat terkait wali yang menikahkan dalam kasus pernikahan sirri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Wali dalam sebuah pernikahan itu merupakan hal yang penting dan sudah di atur ketentuan siapa saja yang berhak menjadi wali baik dalam hukum islam maupun dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu para Majelis Hakim seharusnya lebih mendetail untuk melihat dan memeriksa apakah sudah terpenuhi syarat wali yang menikahkan baik sesuai hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku kepada para pemohon yang ingin melakukan istbat ke Pengadilan Agama Dumai.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ghani Abdullah, Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan. Mimbar Hukum No. 23 Thn VI 1995 November-Desember, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.
- A. Zuhdi Muhdlor, 2007, *Memahami Hukum Pernikahan (NTC&R)*, Bandung: Al-Bayan.
- Abdul Ghani Abdullah, 1991, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermasa.
- Abdurrahman al-Jaziri, 1986, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2007, (Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abi Abdillah Malik bin Anas Al-Asbahi, 1967, *Muwatha Imam Malik*, Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah.
- Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, 1423 H/ 2002 M , *Sunan at-Turmudzi*, Beirut : Dar al-ma'rifah.
- Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, 1423 H/ 2002, *Sunan at-Turmudzi*, Beirut: Dar al-ma'rifah.
- Ahmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Mukti Arto, 1996, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum No.28 Tahun VII, Mei-Juni.
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian: menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, 1993, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga.
- Amir syarifuddin, 2007, *hukum nikah islam di Indonesia: antara fiqih munakahat dan undang undang nikah*, Jakarta: Kencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan , 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1\1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Asrorun Ni"am Sholeh, 2008, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas.

Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, 2017, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.

Basith Mualy, 2011, *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, Surabaya: Quntum Media.

Data dari Pengadilan Agama Dumai

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI, 2002, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.

Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1 / 1974*, Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia.

<http://pa-dumai.go.id/tentang-pengadialn/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses ada 16 Maret 2019 jam 4:26.

<http://pa-dumai.go.id/tentang-pengadialn/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 30 Maret jam 13:43

<http://pa-dumai.go.id/tentang-pengadialn/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> di akses ada 16 Maret 4:26.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah> diakses pada tanggal 30 Maret jam 13:43

Ibnu Taimiyah, 1997, *Hukum-Hukum Perkawinan*. Penerjemah: Rusnan Yahya, (ed), Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Kamal Mukhtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

M Sujari Dahlan, 1996, *Fenomena Nikah Sirri*, Surabaya: Pustaka Progresssif.

Ma'ruf Amin, dkk, 2011, *HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975*, Jakarta: Erlangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mahful M. dan Herry Mohammad, 1996, *Fenomena Nikah Sirri*, Jakarta: IKAPI.

Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Teknisi Administrasi dan Teknisi di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: 4 april.

Moch. Anwar, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro. Dikutip dari kitab I'anatut Thalibin, juz IV, cet. Ke-1

Mohd Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Fu'ad Syakir, 1997, *Perkawinan terlarang: al-misyar (kawin perjalanan), al-urfi (kawin bawah tangan), as-sirri (kawin rahasia), al-mut'ah (kawin kontrak)*. Penerjemah Fauzun Jamal & Alimin, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.

Muhammad Syatha al- Dimyathi, *Hasyiah I'anatut thalibin*, Indonesia: Dar Ihya al-kutub al-arabiyah, juz IV

Muhammad Yunus, 1998, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.

Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-1.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 *tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Quraishihab, 1998, *Wawasan Al qur'an Tafsir Maudhu'I* atas perbagai persoalan umat, cet. VIII, Jakarta: mizan.

Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana.

Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah* 6, Bandung: PT. Al-ma'arif, penerjemah Mohammad Thalib, Cet. Ke-7,

Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Soedjono Dirojosworo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Sudarsono, 1997, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamil al – qur'an dan terjemahannya

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahbah al zul – zuhaili, 1989, *fiqh al islam wa 'adillatuh*, juz VIII cet. III, Beirut, dar al – fikr.

Wasit aulawi, 1996, *pernikahan harus melibatkan masyarakat*, mimbar hukum, no. 28.

Wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai.

Yayan Sofyan, 2002, *Itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*. Ahkam IV, No. 8.

Zainudi Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

UIN SUSKA RIAU



PENGADILAN AGAMA DUMAI KELAS 1B

Jln. Putri Tujuh, Telp. (0765) 31928

Dumai 28812

Homepage : www.pa-dumai.go.id - Email : padumai7@gmail.com

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : W4-A11/ 1006 /Kp.01.2/7/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Dumai menerangkan bahwa :

Nama	: M. FADILISSYAKUR. S
NIM	: 1152110469
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyah / Syariah dan Hukum
Judul Penulisan	: Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Sirri Wali yang tidak memenuhi Syarat.

Bahwa nama sebagaimana tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi Program Sarjana Strata I (S1) di Pengadilan Agama Dumai dari tanggal 26 Februari s/d 10 Maret 2019, dengan judul " Analisis kompilasi Hukum Islam terhadap Isbat Nikah Sirri Wali Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan " .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 30 Juli 2019
Ketua



Drs. Ahmad Sayuti, M.H.
NIP. 19660415.199403.1.005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

CATATAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH
PENGUJI I

: M. FADILISSYAKUR. S
: 11521104169
: HUKUM KELUARGA

isi "Calculus penelitian"

isi "Metode pengumpulan data"

Out line penelitian

isi penulisan catatan kaki

penulisan daftar pustaka

isi soal (type/kasus) & beri Syawal/keabsah !

isi Bab II

UIN SUSKA RIAU

Penguji I

Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diijazkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP
KEBAHAKSIAN SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERKAWINAN
ditulis oleh saudara :

Nama : M.FADILISSYAKUR.S
NIM : 11521104169
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Diseminarkan pada:
Hari / Tanggal : Selasa, 11 Desember 2018
Narasumber : Dr. H. MAGHFIRAH, M.A

telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Lab. Bagian Akademik

Pekanbaru,
Narasumber

Rosmiah, S.Ag.

NIP. 19740910 200312 2 003

Dr. H. MAGHFIRAH, M.A
NIP. 197410252003121002



PENGADILAN AGAMA DUMAI KELAS I B

Jln. Putri Tujuh, Telp. (0765) 31928

Dumai 28812

Homepage : <http://www.pa-dumaigo.id> - Email : padumai@mail.com

Nomor : W4-A11/ 233/PP.00.4/2/2019
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Izin Penelitian

26 Februari 2019

Yth. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Dumai

di -
Dumai

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 134.071/II/2019/41, tanggal 19 Pebruari 2019, Perihal mohon Izin penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa sebagaimana yang tersebut dibawah ini :

Nama : M.FADILISSYAKUR.S

N i m : 11521104169

Program Studi : Hukum Keluarga

Yang akan melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi pada Kantor Pengadilan Agama Dumai untuk skripsi dengan judul “ **ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERKAWINAN** “. Sehubungan dengan hal tersebut maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dumai.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua

Drs. AHMAD SAYUTI, M.H.
NIP. 19660415.199403.1005

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/17046

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U-0075/1/PP.000/99/2019 Tanggal 3 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **M. FADILISSYAKUR. S**
2. NIM / KTP : **11521104169**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERKAWINAN**
7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Januari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
 Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ 4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA DUMAI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Jalan Tuanku Tambusai - Bagan Besar Telepon/Faximile : (0765) 4300035, 4300037

E-mail : kesbangpoldumai@gmail.com

DUMAI

REKOMENDASI .

Nomor : 134.071/II/2019/41

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, setelah membaca surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/17046 tanggal 7 Januari 2019 perihal rekomendasi penelitian.

Dengan ini memberikan Rekomendasi yang dimaksud kepada :

Nama : **M. FADILISSYAKUR.S**
 Nomor Mahasiswa : 11521104169
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jenjang : S.1
 Alamat : Jl. Mundam Dumai - Riau
 HP. 0822-8398-3065

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Pengadilan Agama Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERKAWINAN".

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menghormati Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 (tiga) Bulan terhitung mulai tanggal 19 Februari s/d 19 Mei 2019.
4. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Ditukikan surat Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Dumai
 Pada Tanggal 19 Februari 2019

A.n. KEPALA
 Kasir Kesbang & Hanbang



HARMINA, S.Kom

Nip. 19770228 200901 2 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Dumai
2. Ka. Pengadilan Agama Kota Dumai
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan.



SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: **MUHAMMAD FADILISSYAKUR SUDARMANTO**
 : 11521104169
 : **HUKUM KELUARGA**
 : **ANALISA KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERNIKAHAN**

Pembimbing : **Dr. Drs. Hajar, M.Ag**

Pada tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 September 2019

An, Pimpinan Redaksi

M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL
NIP. 1988 0430 2019031010

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUHAMMAD FADILISSYAKUR SUDARMANTO

NIM : 11521104169

Tempat/ Tanggal Lahir : DUMAI, 19 MARET 1995

Program Studi : HUKUM KELUARGA

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISA KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ITS BAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERNIKAHAN" adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 September 2019

Yang membuat pernyataan

MUHAMMAD FADILISSYAKUR SUDARMANTO

NIM. 11521104169

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan pengutipan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terakhir dengan tentang hukum pernikahan ini, lalu juga miralinya
 di dalam pembukuan pernikahan ini ternyata para pihak tidak
 bisa untuk membuktikannya melalui alat bukti di pengadilan
 alat bukti itu ada 5 : 1. Surat. 2. Keti. 3. Persangkaan
 4. Pengakuan. 5. Dugaan.
 tentang pernikahan ini kadang-kadang pernikahan ini itu
 kadang-kadang diumumkan kepada orang kerumahnya ini itu
 kadang-kadang juga ada diantaranya itu para ratri yang
 kadang-kadang saat mereka menikah itu sudah meninggal dunia
 orang-orang tidak tahu lagi keberadaannya. Jadi dalam
 pernikahan kadang-kadang para pihak dia tidak bisa meng
 bukti yang menyatakan pernikahan pernikahan
 itu ketika mereka tidak bisa membuktikan alat
 bukti di dalam persidangan. Untuk di hadapan
 di dalam persidangan, maka biasanya hakim menanyakan
 ke para pihak apakah bersedia untuk bersumpah
 bersumpah. Kalau mereka itu bersedia untuk
 bersumpah, maka biasanya mereka telah melakukan
 pernikahan. Kemudian apa yang diuraikan di dalam pernikahan
 itu itu mereka sumpah itu adalah benar adanya, lalu
 kemudian hakim ini dan ratunysini begini juga
 dengan hakim dan juga qabulnya lalu kemudian mereka
 bersumpah. maka, dalam konteks fah itu kan rumahnya
 artinya ketika mereka bersumpah bahwa
 dia sudah menikah. pernikahan pernikahan itu adalah
 rumah. lalu ketika mereka menikah, kemudian
 hakim mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Dum



KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa perkara tertentu dalam sidang telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah:

Bin Ranto, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Jl. Kesuma Gg. Amin, RT. 16, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai sebagai Pemohon I;

Nasution Binti Rungga, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. Kesuma Gg. Amin, RT. 16, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagai Pemohon II;



Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Mengingat bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 20 April 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Dumai dibawah register Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Dum tanggal 20 April 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah setelah diubah dan disempurnakan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Aek Lapat Kecamatan Batang Angkota Kabupaten Tapanuli Selatan;



Berdasarkan dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

SIDANG

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 141/20/2017, atas nama Sapar Harahap dan Masroni Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukat, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah dinazagelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

M. Hani Harahap, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kesuma Nomor 6 A, Gang Rambutan, RT 16., Kelurahan Jaya

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa saksi kena! Pemohon I dan Pemohon II karena kakak saksi
kakak dengan kakak Pemohon I,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diangsurkan di
Banda Aceh pada tahun 1990;

Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan
ah, maupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan adanya
ah untuk menikah

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup

sehari-hari tidak ada tanggapan negatif dan keberatan terhadap

pernikahan mereka dan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana

nyaknya suami isteri dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak

ing bernama,

Sahrul Efendi, Lahir pada tanggal 09 Oktober 1992

Alex Sanriadi, Lahir pada tanggal 10 Juli 1997

Fardinsyah Harahap, Lahir pada tanggal 02 Agustus 1999

Tokkos Harahap, Lahir pada tanggal 08 September 2003

Rizky Solihin, lahir pada tanggal 28 April 2007

Sahlan Agus Ramadhan, Lahir pada tanggal 06 Agustus 2012

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap

dipersidangan pada hari ini yaitu untuk mengajukan istbat nikah

guna menguatkan dan menetapkan pernikahan para Pemohon, dan

uga untuk kelengkapan akta kelahiran perawannya

Bahwa Kedua Pemohon tidak sanggup lagi mengajukan bukti

apapun lagi selain bukti di atas.

Bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tidak mengetahui

peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang diketahui

hanyalah tidak adanya pihak yang keberatan dengan pernikahan para

Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangannya tidak dapat

dijadikan sebagai alat bukti maka harus dilengkapi dengan bukti lain

Halaman 5 dari 11 No. Pendaftaran: Nomor 2015/Pdt/2017/PA Gum



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena kakek saksi dan kakek Pemohon I adalah adik kakak.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Angkola pada tahun 1990.

4. Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan adanya hubungan untuk menikah.

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada tanggapan negatif dan keberatan terhadap pernikahan mereka dan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak sebagai berikut:

Sahrul Efendi, Lahir pada tanggal 09 Oktober 1992

Alex Sanriadi, Lahir pada tanggal 10 Juli 1997

Fardiyah Harahap, Lahir pada tanggal 02 Agustus 1999

Tokda Harahap, Lahir pada tanggal 08 September 2003

Rizky Mohin, Lahir pada tanggal 28 April 2007

Sahlu Agus Ramadhan, Lahir pada tanggal 06 Agustus 2012

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

9. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II.

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan pada hari ini yaitu untuk mengajukan istbat nikah guna melanjutkan dan menetapkan pernikahan para Pemohon, dan juga untuk kelengkapan data untuk perkawinannya.

2. Posen Nasution Tetty Herawati binti Kanmuda, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kelahiran Jalan Silwangi, Gang Tunas Jaya RT 08, Kelurahan Kelaman Pias, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Lembar, Nomor 0015/PdLP/2017/PA.Dum



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

... bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain;

... untuk melengkapi alat bukti Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan sumpah suppletioir sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Dum tanggal 14 Juni 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

“Saya (Pemohon I dan Pemohon II) bersumpah bahwa yang tertera dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar dari pada yang sebenarnya.

... selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan persangkaan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan diadopsi sebagai bagian yang tak terpisahkan dan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

... bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

... bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Putusan Nikah ini disebabkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dimana pernikahan sepasang suami istri tersebut dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Lantak Kecamatan Batang Angkota Kabupaten Tapanuli Selatan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah Romli Harahap, disaksikan dan orang saksi nikah bernama Poren Nasution dan Oppu Julu Nasution serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

... bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P, serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

... bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua Pemohon I dan Pemohon II, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA Dum



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Julu Nasution serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan.

Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada tanggapan negatif dan keberatan terhadap pernikahan mereka dari masyarakat sekitar tempat tinggal mereka.

Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama:

- Shahul Efendi, Lahir pada tanggal 09 Oktober 1992
- Alex Sanriadi, Lahir pada tanggal 10 Juli 1997
- Firdinsyah Harahap, Lahir pada tanggal 02 Agustus 1999
- Takkis Harahap, Lahir pada tanggal 08 September 2003
- Roky Solihin, lahir pada tanggal 28 April 2007
- Shihun Agus Ramadhan, Lahir pada tanggal 06 Agustus 2012

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II.

Mengingat bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengingat bahwa berdasarkan bukti B terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam.

Mengingat bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu a) Calon suami, b) Calon Istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul.

Mengingat bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) perkawinan, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat pernikahan, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat pernikahan.

Halaman 8 dari 11 File: C:\Users\... No: 0015/PdLP/2017/PA.Dur



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MENETAPKAN

Menetapkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,

Menetapkan sah pertukaran antara Pemohon I (Sapar Harahap Bin
Pemohon-II (Masroni Nasution Bin Rungga) yang
terjadi pada tanggal 09 Desember 1990 di Desa
Balang Angkota Kabupaten Tapanuli Selatan

Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya
Rp. 191.000,- (seratus ratus sembilan puluh satu ribu

ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2017 Masehi.

tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Kami T.
Mufardisshadri S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.

Badrul Jamal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Zalnudin Korompot, S.H. sebagai Panitera

dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Tid

T. Mufardisshadri S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Tid

UIN SUSKA RIAU

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



pertama yaitu pada Sekolah MTS Negeri kota Dumai dan lulus pada tahun 2009. Setelah lulus dari sekolah tingkat pertama kemudian melanjutkan ke tingkat atas di MAN 1 Dumai dan lulus pada tahun 2013. Keseluruhan sekolah tersebut terletak di Kota Dumai, Riau. Setelah itu mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keislaman Negeri dan lulus pada Jurusan Hukum, Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Penulis mengikuti Sidang Munaqasyah yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019. Semasa menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Riau (PMII) sebagai Ketua Rayon fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Penulis melakukan penelitian dengan judul “**ANALISA KOMPILASI HUKU ISLAM TERHADAP ISTBAT NIKAH SIRRI WALI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERNIKAHAN**”

Alhamdulillah ada tanggal 27 Agustus 2019 dinyatakan LULUS setelah mengikuti ujian Munaqasyah dengan predikat SANGAT MEMUASKAN, dan berhak menyandang gelar sarjana hukum.